

PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI ERA DIGITAL: PERAN DAN  
KESADARAN MAHASISWA

Jennifer Lawrence

Universitas Bandar Lampung

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Email: [@jenniferlawrence2903@gmail.com](mailto:@jenniferlawrence2903@gmail.com)**ABSTRACT**

*A One type of serious crime that endangers the country, hinders progress, and worsens the socio-economic conditions of society is corruption. Corruption continues to be a major problem in Indonesia. However, the government and related institutions have made various efforts to prevent and eradicate it. The purpose of this study is to evaluate the role of students in preventing corruption in the current technological era. This study focuses on how students use digital technology to raise public awareness and build an anti-corruption culture. The results of the study indicate that students have a high potential to act as the main drivers in preventing corruption. They can use digital technology to teach people, implement the importance of integrity, and increase public participation in overseeing government policies and actions.*

**Keywords:** Corruption, Prevention, Students, Digital Era, Technology, Awareness

**ABSTRAK**

Salah satu jenis kejahatan serius yang membahayakan negara, menghambat kemajuan, dan memperburuk kondisi sosial-ekonomi masyarakat adalah korupsi. Korupsi terus menjadi masalah besar di Indonesia. Namun, pemerintah dan lembaga terkait telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi peran mahasiswa dalam pencegahan tindak pidana korupsi di era teknologi saat ini. Penelitian ini berfokus pada bagaimana mahasiswa menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan kesadaran publik dan membangun budaya antikorupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki kemungkinan besar untuk bertindak sebagai penggerak utama dalam pencegahan korupsi. Mereka dapat menggunakan teknologi digital untuk mengajar orang, menerapkan pentingnya integritas, dan meningkatkan partisipasi publik dalam mengawasi kebijakan dan tindakan pemerintah.

**Kata Kunci:** Korupsi, Pencegahan, Mahasiswa, Era Digital, Teknologi, Kesadaran

**Article History**

Received: Oktober 2024

Reviewed: Oktober 2024

Published: Oktober 2024

Plagiarism Checker No  
234Prefix DOI : Prefix DOI :  
10.8734/CAUSA.v1i2.365**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed  
under a [Creative  
Commons Attribution-  
NonCommercial 4.0  
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

**I. PENDAHULUAN**

Dalam beberapa dekade terakhir, kemajuan teknologi digital telah membuka peluang besar untuk mencegah tindak pidana korupsi di Indonesia. Dengan munculnya internet, media sosial, *big data*, dan aplikasi pelaporan online seperti LAPOR! Dan *Whistleblowing System* (WBS), masyarakat, termasuk mahasiswa, memiliki akses yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam memerangi korupsi. Sebagai generasi yang mahir dalam teknologi, mahasiswa sangat berperan dalam memanfaatkan kemajuan ini untuk kampanye antikorupsi melalui media sosial dan gerakan digital lainnya. Namun, masalah seperti kesadaran kritis yang buruk dan kurangnya literasi digital menghalangi siswa untuk melakukan yang terbaik dari tugas mereka. Meskipun

demikian, mahasiswa memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan dalam menciptakan masyarakat yang lebih transparan dan bertanggung jawab di era digital berkat peningkatan literasi digital dan kesadaran akan pentingnya mencegah korupsi.

Meskipun teknologi telah membuka banyak peluang, masih ada masalah besar. Tidak semua siswa memiliki literasi digital yang cukup untuk memanfaatkan teknologi untuk mencegah korupsi secara optimal. Tidak banyak orang yang tahu bagaimana menggunakan platform digital dengan baik dan bagaimana mekanisme dan efek korupsi bekerja. Ini membuatnya sulit untuk memaksimalkan peran mereka. Selain itu, perlu ada peningkatan kesadaran kritis siswa tentang masalah korupsi di era digital. Ini dapat dicapai dengan memasukkan materi antikorupsi ke dalam kurikulum sekolah dan dengan melibatkan siswa secara langsung dalam gerakan sosial. Secara keseluruhan, kemajuan teknologi digital telah memberi mahasiswa banyak kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam pencegahan korupsi. Mahasiswa memiliki potensi strategis untuk menjadi agen perubahan dalam memerangi korupsi di era digital. Mereka dapat memainkan peran kunci dalam menciptakan lingkungan sosial dan politik yang lebih transparan, bertanggung jawab, dan bebas dari korupsi dengan meningkatkan literasi digital dan kesadaran kolektif tentang pentingnya pencegahan korupsi.

Perkembangan teknologi digital telah membuka banyak peluang untuk mencegah tindak pidana korupsi. Namun, ada beberapa masalah utama yang masih menghalangi mahasiswa untuk memanfaatkan peran mereka sebaik mungkin. Salah satu masalah utama adalah kesadaran mahasiswa tentang pentingnya berpartisipasi dalam pencegahan korupsi. Banyak siswa belum menyadari bahwa mereka dapat berperan aktif sebagai agen perubahan dengan menggunakan teknologi digital. Mahasiswa kurang menyadari dampak negatif korupsi terhadap kemajuan negara dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, mahasiswa sering dianggap mahir teknologi. Namun, mereka masih kekurangan pengetahuan digital yang mendalam, terutama tentang cara menggunakan teknologi untuk mencegah korupsi. Banyak siswa tidak tahu cara menggunakan teknologi seperti platform media sosial dan aplikasi pelaporan korupsi untuk melakukan kampanye antikorupsi atau mengawasi pemerintah.

Selain itu, penurunan literasi digital berdampak pada partisipasi mahasiswa dalam gerakan antikorupsi berbasis teknologi. Terakhir, kebijakan pemerintah dan lingkungan pendidikan masih kurang mendukung mahasiswa dalam aksi antikorupsi. Mahasiswa tidak dapat berpartisipasi secara aktif dalam pencegahan korupsi karena masalah antikorupsi tidak dimasukkan ke dalam kurikulum perguruan tinggi dan tidak ada program pelatihan yang membahas bagaimana menggunakan teknologi untuk mencegah korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa tidak memiliki peran yang cukup besar sebagai penggerak perubahan sosial, meskipun mereka masih dapat membantu mencegah korupsi di era digital.

Metode wawancara digunakan untuk mempelajari perspektif, pemahaman, dan pengalaman mahasiswa terkait peran mereka dalam mencegah korupsi di era digital. *Responden* adalah siswa dari berbagai latar belakang pendidikan yang telah terlibat dalam kampanye sosial berbasis teknologi atau antikorupsi. Wawancara ini bersifat semi-terstruktur, dengan peneliti membuat beberapa pertanyaan dasar tetapi membiarkan peserta menjelaskan pandangan dan pengalaman mereka secara lebih bebas dan mendalam. Termasuk pertanyaan tentang pengetahuan mahasiswa tentang tindak pidana korupsi, persepsi mereka tentang peran teknologi dalam mencegah korupsi, dan cara mahasiswa menggunakan platform digital untuk kampanye antikorupsi.

Tujuan wawancara ini adalah untuk mendapatkan informasi langsung dari siswa tentang tingkat kesadaran mereka, kesulitan yang mereka hadapi, dan metode yang mungkin mereka gunakan untuk meningkatkan partisipasi mereka. Metode Studi Literatur yaitu dari berbagai sumber, termasuk buku, jurnal, artikel, dan laporan penelitian, dikumpulkan dan dianalisis dalam penelitian ini terkait dengan penggunaan teknologi digital, pencegahan korupsi, dan peran mahasiswa dalam gerakan sosial.

Penelitian yang dikaji mencakup teori dan konsep tentang korupsi, metode teknologi untuk memerangi korupsi, dan contoh gerakan antikorupsi yang berhasil di Indonesia. Selain itu, literatur mencakup penelitian tentang bagaimana generasi muda, khususnya mahasiswa, telah memanfaatkan teknologi digital untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, politik, dan

advokasi. Penelitian ini membantu membangun kerangka teoretis yang kuat untuk memahami peran mahasiswa dalam era modern dan memberikan landasan ilmiah untuk menilai temuan wawancara.

Ada sejumlah opsi yang dapat digunakan untuk meningkatkan peran dan kesadaran mahasiswa dalam mencegah korupsi di era komputer dan internet. Pertama, diperlukan peningkatan literasi digital siswa melalui program pelatihan yang berfokus pada penggunaan teknologi informasi dalam upaya antikorupsi, seperti penggunaan aplikasi media sosial untuk melaksanakan kesadaran dan pelaporan korupsi. Kedua, masyarakat dapat belajar tentang korupsi dan dampaknya melalui seminar, diskusi panel, dan *workshop*. Ini dapat melibatkan mahasiswa, guru, dan praktisi antikorupsi. Selain itu, kolaborasi antara mahasiswa dan lembaga antikorupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat berhasil karena mahasiswa dapat berpartisipasi dalam program mereka, seperti magang dan kampanye kesadaran publik.

Teknologi memiliki banyak potensi, tetapi siswa perlu meningkatkan literasi digital dan kesadaran kritis mereka untuk melawan korupsi. Mahasiswa dapat memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan bertanggung jawab di masa depan jika mereka dididik dengan benar dan bekerja sama. Jadi, langkah strategis untuk mencegah korupsi yang lebih baik dan berkelanjutan adalah mendorong siswa untuk menggunakan teknologi digital.

1. Menemukan peran mahasiswa dalam pencegahan korupsi di era digital.
2. Mengevaluasi tingkat kesadaran mahasiswa tentang pentingnya pencegahan korupsi.
3. Mengkaji cara mahasiswa dapat menggunakan teknologi digital, seperti media sosial, aplikasi pelaporan, *big data*, dan AI, untuk melacak dan melaporkan kasus korupsi.
4. Membangun metode untuk meningkatkan literasi digital dan kasus korupsi.

## II. RUMUSAN MASALAH

- 1) Seberapa sadar siswa terhadap jenis korupsi yang terjadi di era teknologi?
- 2) Apakah mereka menyadari bahaya dan kemungkinan korupsi yang terkait dengan penggunaan teknologi?
- 3) Bagaimana mahasiswa dapat membantu mencegah pelanggaran di era teknologi?
- 4) Apakah mahasiswa sudah berpartisipasi secara aktif dalam mendukung tanggung jawab dan transparansi?

## III. PEMBAHASAN

Di era digital, pencegahan <sup>1</sup>tindak pidana korupsi menjadi sebuah tantangan besar, tetapi juga memberikan peluang bagi berbagai pihak untuk berpartisipasi secara aktif dalam mengatasi masalah ini. Teknologi baru telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, seperti kontrol publik, akuntabilitas, dan transparansi. Dalam situasi ini, sebagai generasi muda, mahasiswa memiliki tanggung jawab strategis untuk berpartisipasi secara aktif dalam mencegah dan melawan praktik korupsi yang semakin kompleks berkat kemajuan teknologi. Di era modern, korupsi telah berkembang melalui saluran digital, seperti manipulasi data, transaksi keuangan ilegal melalui internet, dan pencucian uang *online*.

Sebagai generasi yang lahir dan besar di tengah kemajuan teknologi,<sup>2</sup> mahasiswa memiliki potensi besar untuk menggunakan teknologi untuk membantu mencegah korupsi. Mahasiswa memiliki peran penting sebagai agen perubahan yang memiliki kemampuan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas publik melalui berbagai platform digital. Mahasiswa dapat menyuarakan pentingnya mencegah korupsi dan mengedukasi masyarakat tentang dampak buruk korupsi terhadap pembangunan sosial dan ekonomi jika mereka memiliki akses mudah ke blog, media sosial, dan platform digital lainnya. Dengan menyebarkan informasi yang benar dan mengajak orang lain untuk mencegah korupsi, mahasiswa dapat bertindak sebagai pengawal integritas dalam hal ini.

---

<sup>1</sup> Kurniawan, D. "Peran Mahasiswa dalam Pencegahan Korupsi di Era Digital," *Jurnal Anti-Korupsi*, Vol. 7, No. 3, 2023, pp. 15-22.

<sup>2</sup> Komisi Informasi Publik (KIP). "Peran Mahasiswa dalam Meningkatkan Kesadaran Publik tentang Bahaya Korupsi Melalui Media Sosial," *Laporan Penelitian KIP*, 2023.

Meskipun ada potensi besar ini, kesadaran mahasiswa tentang tindak pidana korupsi di era digital masih menjadi masalah. Banyak siswa belum memahami secara menyeluruh bagaimana korupsi dapat terjadi dalam lingkungan digital. Ini karena, di era teknologi seperti saat ini, korupsi dapat terjadi dalam bentuk yang lebih tersembunyi dan sulit dideteksi, seperti melalui manipulasi data atau penggunaan aplikasi digital yang tidak transparan. Oleh karena itu, literasi digital yang lebih baik dan pemahaman yang lebih baik tentang korupsi berbasis teknologi sangat penting. Mahasiswa harus memahami bagaimana teknologi dapat digunakan untuk mencegah korupsi dan menghindari penyalahgunaannya untuk tindakan koruptif.

Dengan melihat potensi pemanfaatan teknologi seperti *big data*, kecerdasan buatan (AI), dan *blockchain* dalam mendukung transparansi, pentingnya literasi digital untuk mencegah korupsi semakin jelas. Teknologi seperti ini memungkinkan pengawasan yang lebih ketat terhadap transaksi keuangan dan penggunaan dana publik. Misalnya, *blockchain* dapat digunakan untuk membuat sistem keuangan yang lebih transparan dan sulit dimanipulasi, dan *big data* memungkinkan analisis transaksi dalam skala besar untuk menemukan anomali yang dapat menyebabkan korupsi. Mahasiswa yang memiliki latar belakang pendidikan yang baik dalam bidang teknologi digital dapat berkontribusi pada pengembangan dan pemanfaatan teknologi tersebut untuk membantu memerangi korupsi.

Di era digital<sup>3</sup>, keterlibatan siswa dalam berbagai program dan kampanye antikorupsi juga sangat penting untuk meningkatkan kesadaran publik. Mahasiswa dapat menjadi pendorong dalam kampanye digital yang bertujuan untuk memberi tahu masyarakat tentang bahaya korupsi melalui media sosial, seminar *online*, dan platform diskusi digital. Gerakan yang melibatkan mahasiswa ini akan meningkatkan kesadaran siswa dan masyarakat umum, menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk pemberantasan korupsi.

Meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam pencegahan korupsi adalah tantangan terbesar. Hambatan utama adalah kurangnya literasi digital di kalangan siswa. Terlepas dari fakta bahwa generasi muda lebih terbiasa dengan teknologi, mereka masih tidak memahami secara mendalam bagaimana teknologi tersebut dapat digunakan untuk mencegah korupsi. Selain itu, ada masalah dengan mendapatkan data dan informasi yang terbuka. Meskipun pemerintah telah berusaha untuk memberikan akses publik ke data keuangan dan anggaran, tidak semua siswa memiliki kemampuan analisis yang cukup untuk melihat data tersebut.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil harus bekerja sama. Universitas dapat membantu dengan menawarkan kursus khusus yang berfokus pada literasi digital dan pencegahan korupsi. Sehingga mahasiswa dapat berpartisipasi lebih aktif dalam pencegahan korupsi, mereka harus dibekali keterampilan analisis data dan pengetahuan tentang undang-undang antikorupsi. Selain itu, pemerintah harus memastikan bahwa siswa dan masyarakat umum dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang pengelolaan anggaran publik.

Melibatkan siswa<sup>4</sup> dalam program magang atau penelitian tentang teknologi pencegahan korupsi adalah cara lain untuk meningkatkan peran mereka dalam pencegahan korupsi di era modern. Misalnya, mahasiswa dari bidang teknologi informasi atau ekonomi dapat melakukan penelitian tentang penggunaan *Blockchain* dalam sistem keuangan publik atau tentang pembuatan aplikasi pelaporan publik yang lebih efisien. Dengan cara ini, mahasiswa tidak hanya memperoleh pengetahuan teoretis tetapi juga keterampilan yang dapat mereka gunakan untuk membantu mencegah korupsi.

Untuk menghentikan kejahatan korupsi di era internet, mahasiswa harus berpartisipasi secara aktif sebagai agen perubahan. Teknologi dapat membantu siswa meningkatkan kesadaran publik akan bahaya korupsi dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan siswa dapat mengatasi masalah seperti kurangnya literasi digital dan akses informasi yang terbatas. Mahasiswa dapat menjadi garda

---

<sup>3</sup> Priyono, D. "Pendidikan Anti-Korupsi Berbasis Teknologi di Era Digital," Jurnal Ilmu Hukum dan Teknologi, Vol. 12, No. 2, 2022, pp. 89-99.

<sup>4</sup> Rachman, H. "Pemanfaatan Blockchain dalam Sistem Keuangan Publik: Peluang untuk Mencegah Korupsi," Jurnal Teknologi Informasi dan Keuangan Publik, Vol. 7, No. 4, 2023, pp. 101-112.

terdepan dalam menciptakan masyarakat yang bebas korupsi di era digital dengan meningkatkan literasi digital mereka dan berpartisipasi aktif dalam program antikorupsi.

Sifat global dari kehidupan yang semakin berkembang memberikan pilihan baru yang menangani berbagai bagian kehidupan, seperti sistem hukum nasional, tetapi juga meningkatkan kehidupan global, bahkan jika hal tersebut menguntungkan lokalisasi. Setelah memperoleh kemerdekaan, Indonesia berkomitmen untuk memiliki hukum yang sesuai dengan identitasnya melalui proses evolusi hukum. Sebagian besar hukum Indonesia berpusat pada undang-undang tertulis. Positivisme adalah sudut pandang filosofis yang menekankan tindakan formal dan nyata, dan memiliki otoritas untuk membagi wilayah negara untuk membentuk yurisdiksi nasional.

<sup>5</sup>Digitalisasi sistem hukum membantu administrasi peradilan, terutama bagi masyarakat yang terpinggirkan yang menghadapi kesulitan untuk mendapatkan bantuan hukum. Orang-orang yang terpinggirkan, kurang mampu secara finansial, dan memiliki mobilitas terbatas dapat dengan mudah mendapatkan layanan hukum berkat digitalisasi. Dengan menggunakan platform internet dan aplikasi seluler, orang dapat mendapatkan nasihat hukum, konsultasi, dan dukungan tanpa perlu pergi jauh atau mengeluarkan biaya yang mahal.

Menurut Santiadi (2019), teknologi memungkinkan penggunaan sistem pengaduan online, yang mempercepat proses pengajuan pengaduan dan meminta bantuan hukum. Akibatnya, teknologi ini memperluas jangkauan keadilan ke populasi yang lebih besar. Pengadilan online dan mediasi digital mempermudah penyelesaian sengketa hukum. Metode ini membantu masyarakat yang terpinggirkan karena mereka tidak dapat mengakses kerangka hukum konvensional karena alasan geografis, ekonomi, atau fisik. Para pihak dapat menyelesaikan konflik dari lokasi masing-masing melalui penyelesaian sengketa online, yang mengurangi kebutuhan untuk perjalanan dan biaya yang terkait. Digitalisasi mengurangi kesenjangan keadilan dan memberikan pilihan yang lebih adil dan inklusif bagi semua orang.

Integrasi AI dan *blockchain* mungkin memperbarui sistem peradilan Indonesia. Ini termasuk mengembangkan ide kreatif dan mengoptimalkan proses hukum. Kecerdasan buatan (AI) dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi hukum dengan membantu penilaian dan analisis kasus dan menggunakan teknik pembelajaran mesin untuk memprediksi hasil kasus, memeriksa tren hukum, dan memberikan panduan untuk pengambilan keputusan hukum (Alarie et al, 2018)

Dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, menyebarkan informasi semakin mudah. <sup>6</sup>Hal ini menyebabkan generasi muda beralih ke buku e-book, yang dapat diakses secara online, daripada buku fisik. Oleh karena itu, peran perpustakaan sebagai penyedia layanan pengetahuan dan informasi telah berubah di era komputer dan internet saat ini. Perpustakaan harus berubah paradigma menjadi berbasis teknologi dan lebih mengembangkan diri agar tetap berfungsi sebagai sumber pembelajaran dan menjadi tulang punggung pendidikan bangsa. Dia berpendapat bahwa perpustakaan merupakan salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan pendidikan perguruan tinggi. Akibatnya, perguruan tinggi harus sangat memperhatikan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan. Ini termasuk ketersediaan buku, jurnal ilmiah internasional, penggunaan teknologi, dan sumber daya manusia pustakawan yang handal.

Dengan perkembangan <sup>7</sup>teknologi komunikasi dan informasi, menyebarkan informasi menjadi lebih mudah. Hal ini mendorong generasi muda untuk beralih ke buku elektronik, yang dapat diakses melalui internet, daripada buku fisik. Oleh karena itu, peran perpustakaan sebagai penyedia layanan pengetahuan dan informasi telah berubah di era komputer dan internet kontemporer. Agar tetap berfungsi sebagai sumber pembelajaran dan menjadi tulang punggung pendidikan bangsa, perpustakaan harus mengubah paradigma menjadi berbasis teknologi dan lebih mengembangkan diri. Dia berpendapat bahwa perpustakaan adalah bagian penting dari

---

<sup>5</sup> Hengki Irawan, Zainudin Hasan (2024). Dampak Teknologi Terhadap Strategi Litigasi dan Bantuan Hukum: Tren dan Inovasi di Era Digital.

<sup>6</sup> Zainudin Hasan, Bagas Satria Wijaya, Aldi Yansah, Rian Setiawan, Arya Dwi Yuda (2024). Strategi Dan Tantangan Pendidikan Dalam Membangun Integritas Anti Korupsi Dan Pembentukan Karakter Generasi Penerus Bangsa.

<sup>7</sup> Muhammad Iqbal, Heru Juli Ardie, Zainudin Hasan (2024). Analisis Hukum Dalam Melacak Jejak Digital Dan Memahami Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Era Teknologi.

pendidikan tinggi, dan universitas harus sangat memperhatikan pengelolaan dan pengembangannya.

Dalam hal contoh lain, penggunaan teknologi jaman sekarang sering sekali terjadinya penipuan salah satunya adalah penipuan transfer melalui *Mobile Mbanking*. Penipuan *Mobile Mbanking*<sup>8</sup> adalah ketika orang menggunakan layanan perbankan elektronik seperti transfer dana, pembayaran tagihan, atau menggunakan kartu kredit dengan cara yang merugikan mereka secara finansial. Ini dapat mencakup penipuan seperti pencurian informasi login, transaksi yang tidak sah, atau tindakan lainnya yang dilakukan melalui aplikasi atau platform perbankan yang digunakan melalui perangkat mobile seperti ponsel atau tablet.

Sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang potensi penipuan yang dilakukan melalui mobile banking. Pengenalan strategi penipuan yang umum, cara mencegah penipuan, dan cara melaporkan tindakan mencurigakan dapat dimasukkan ke dalam materi pendidikan. Untuk menjaga keamanan finansial Anda, sangat penting untuk mencegah penipuan transfer mobile banking. Beberapa tindakan yang dapat diambil :

1. Pendidikan dan Kesadaran: Sangat penting bagi pengguna untuk diberitahu tentang risiko penipuan dan praktik keamanan yang baik. Ini dapat dicapai melalui kampanye kesadaran masyarakat dan pedoman pengguna.
2. Verifikasi Identitas: Pastikan bahwa pengguna yang melakukan transfer adalah pemilik akun yang sah dengan memverifikasi melalui metode otentikasi ganda seperti kode OTP atau biometrik (Amin, Rahman, 2023).
3. Pemantauan Transaksi: Sistem pemantauan transaksi yang canggih dapat menemukan pola transaksi yang mencurigakan dan menghentikan transaksi yang tidak sah.
4. Enkripsi Data: Pastikan bahwa semua data yang dikirim melalui aplikasi perbankan mobile dienkripsi menggunakan algoritma yang canggih untuk memastikan bahwa data tetap aman.
5. Pembaruan Perangkat Lunak: Pastikan aplikasi perbankan mobile selalu tersedia dalam versi terbaru untuk memperbaiki kerentanan keamanan dan melindungi pengguna dari serangan yang sudah diketahui.
6. Validasi Penerima: Sebelum melakukan transfer, periksa informasi penerima dengan cermat. Ini penting terutama untuk penerima yang baru atau tidak dikenal.
7. Pemeriksaan Regular: Cari aktivitas akun, seperti saldo dan transaksi terakhir, untuk menemukan aktivitas yang mencurigakan.
8. Laporkan Kecurangan: Laporkan segera ke bank atau penyedia layanan mobile banking untuk mencegah penipuan.

#### IV. KESIMPULAN

Untuk mencegah tindak pidana korupsi di era digital, mahasiswa harus berpartisipasi secara aktif dan menjadi agen perubahan yang mampu menggunakan teknologi. Mahasiswa dapat dengan mudah mengakses media sosial, aplikasi pelaporan korupsi, dan teknologi canggih seperti big data dan artificial intelligence. Teknologi ini memungkinkan mereka untuk mengawasi dan melaporkan kasus korupsi. Namun, literasi digital yang buruk dan kurangnya kesadaran kritis tentang fungsi mereka dalam pemberantasan korupsi adalah tantangan utama. Dengan meningkatkan literasi digital dan kesadaran siswa, mereka dapat berkontribusi lebih banyak dalam membangun lingkungan sosial yang akuntabel dan transparan. Jadi, mahasiswa memiliki potensi besar untuk menggunakan teknologi digital untuk mencegah korupsi; namun, untuk memaksimalkan peran mereka, diperlukan upaya pendidikan dan kampanye yang berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menentukan peran mahasiswa dalam pencegahan tindak pidana korupsi di era digital.
2. Mengevaluasi tingkat kesadaran mahasiswa tentang pentingnya pemberantasan korupsi.

---

<sup>8</sup> Zainudin Hasan, Anisa Merti Ayu, Chinthia Dita M, Mayse Trisnawati, M. Ardan Aldika R.A (2024). Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Melalui Transfer Mobile Mbanking.

3. Mengkaji cara mahasiswa dapat menggunakan teknologi digital seperti media sosial, aplikasi pelaporan, "big data", dan "artificial intelligence" untuk melacak dan melaporkan kasus korupsi.
4. Mengembangkan metode untuk meningkatkan literasi siswa.

## DAFTAR PUSTAKA

- D, Kurniawan (2023). Peran Mahasiswa Dalam Pencegahan Korupsi Di Era Digital, *Jurnal Anti-Korupsi*, Vol. 7, No. 3, Pp. 15-22.
- Komisi Informasi Publik (KIP) (2023). Peran Mahasiswa Dalam Meningkatkan Kesadaran Publik Tentang Bahaya Korupsi Melalui Media Sosial. Laporan Penelitian KIP.
- D, Priyono. Pendidikan Anti-Korupsi Berbasis Teknologi Di Era Digital. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Teknologi*, Vol. 12, No. 2, 2022, Pp. 89-99.
- Rachman, H. Pemanfaatan Blockchain Dalam Sistem Keuangan Publik: Peluang Untuk Mencegah Korupsi. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Keuangan Publik*, Vol. 7, No. 4, 2023, Pp. 101-112.
- Hasan, Z., Hengki, I. (2024). Dampak Teknologi Terhadap Strategi Litigasi Dan Bantuan Hukum: Tren Dan Inovasi Di Era Digital.
- Hasan, Z., Bagas, S. W., Aldi, Y., Rian, S., Arya, D. Y. (2024). Strategi Dan Tantangan Pendidikan Dalam Membangun Integritas Anti Korupsi Dan Pembentukan Karakter Generasi Penerus Bangsa.
- Hasan, Z., Iqbal, M., A. H. Juli,. (2024). Analisis Hukum Dalam Melacak Jejak Digital Dan Memahami Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Era Teknologi.
- Hasan. Z., A. A. Merti., C. Dita. M., M. Trisnawati., A. Aldika. M. R. A., (2024). Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Melalui Transfer Mobile Mbanking.